



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 04 November 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



80 Desa Ikuti Pilkades Serentak Tahun Depan

Pemungutan Suara Dilakukan

24 Mei 2026

Sidoarjo - BANTAN BASSA

Menjadi salah satu posisi

pada tahun 2026.

Pada hari ini, seluruh

desa di Kabupaten Sidoarjo

memulai pelaksanaan



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Waspada Macet, Jalur Krian-Surabaya Ditutup

Pelebaran Jembatan Jalan Raya Trosobo Taman

TAMAN - Arus kendaraan di jalur utama Krian-Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, kembali mengalami perubahan.

Setelah jalur selatan (Surabaya-Krian) resmi dibuka, kini giliran jalur utara (Krian-Surabaya) yang ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena proyek pelebaran jembatan di sisi utara mulai dikerjakan.

Akibatnya, kemacetan panjang tak terhindarkan, terutama pada jam siang pagi dan sore. Kendaraan dari arah Krian menuju Surabaya harus bergantian melintas melalui jalur berlawanan, lantaran diberlakukan

sistem contra flow atau arus dua arah di satu jalur.

"Setelah jalur selatan rampung dan dibuka, kami langsung beralih ke sisi utara atau arah ke Surabaya mulai Sabtu (1/11). Saat ini penggerjaan sudah memasuki tahap penggalian dan pelebaran struktur jembatan," ujar mandor proyek, Agung, Senin (3/11).

Menurut Agung, progres proyek berjalan sesuai jadwal

dan ditargetkan rampung pada Jumat (28/11) mendatang. Ia memastikan, pekerjaan dilakukan secara maksimal tanpa mengabaikan mutu konstruksi.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan. Tapi kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu," tegasnya.

Jembatan yang berada di sisi barat Flyover Trosobo itu sebelumnya

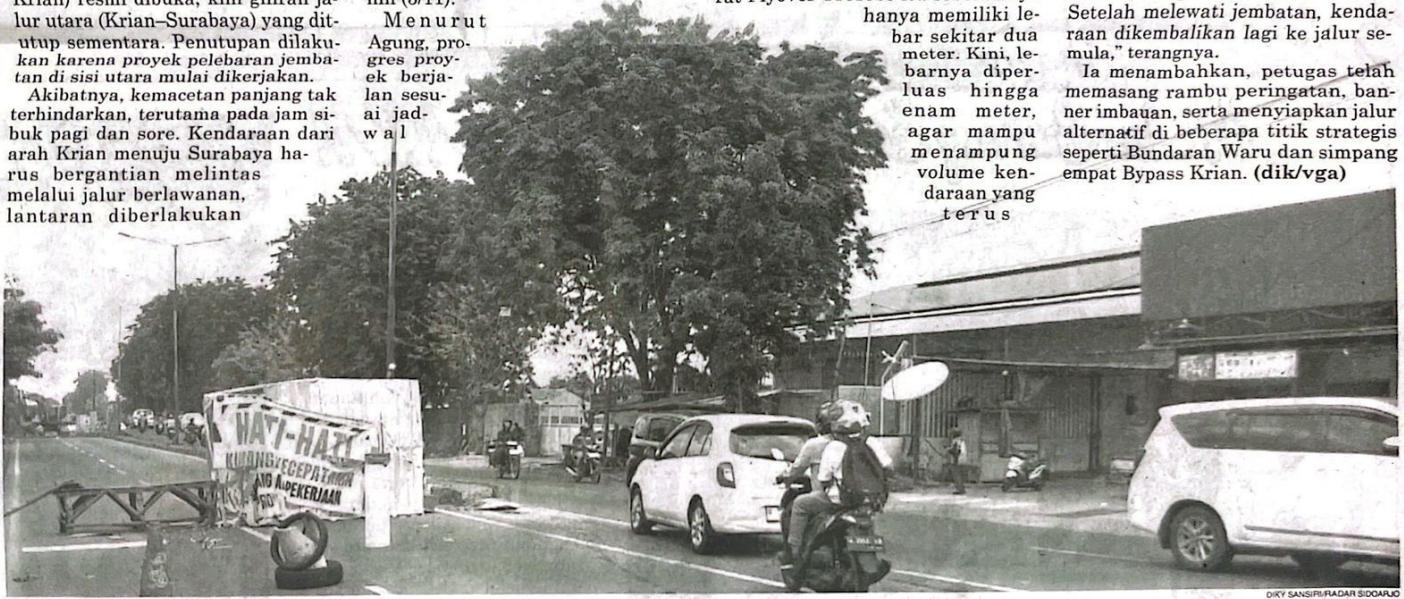
hanya memiliki lebar sekitar dua meter. Kini, lebarnya diperluas hingga enam meter, agar mampu menampung volume kendaraan yang terus

meningkat setiap harinya.

Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Taman Iptu Hari Nurcahyo menjelaskan, pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah menerapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan.

"Arus dari arah Krian menuju Surabaya kami alihkan ke jalur berlawanan, dengan sistem contra flow. Setelah melewati jembatan, kendaraan dikembalikan lagi ke jalur sebelumnya," terangnya.

Ia menambahkan, petugas telah memasang rambu peringatan, banner imbauan, serta menyiapkan jalur alternatif di beberapa titik strategis seperti Bundaran Waru dan simpang empat Bypass Krian. (dik/vga)



DIREKTORAT RADAR SIDOARJO

PERBAIKAN: Giliran jalur Krian-Surabaya ditutup untuk merekayasa jalan mencegah kemacetan.

**RADAR
SIDOARJO.ID**



M SAFUL/RADAR SIDOARJO

Awas Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

KOTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Jawa Timur. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi hingga Rabu, 5 November 2025.

Prakirawan BMKG Juanda, Swasti Ayudia mengatakan, potensi cuaca ekstrem dapat menimbulkan berbagai bencana hidrometeorologi. Mulai hujan lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin ken-

cang, hingga petir dan puting beliung. "Waspadai potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Timur yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi," ucapnya, Senin (3/11).

Dia menjelaskan, saat ini sebagian wilayah Jawa Timur mulai masuki musim hujan setelah melewati masa pancaroba. Peningkatan curah hujan dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer seperti

Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Gelombang Rossby yang melintasi wilayah Jawa Timur.

Selain itu, suhu muka laut yang masih hangat di sekitar Selat Madura juga mendorong pertumbuhan awan hujan konvektif. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang sesaat.

"Untuk Kota Surabaya dan Sidoarjo sepekan ke depan masih berpo-

tensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dan disertai sambaran petir serta angin kencang sesaat," terangnya.

BMKG mengimbau masyarakat dan instansi terkait agar senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca mendadak. Wilayah dengan kondisi lereng, tebing, dan dataran curam diminta lebih berhati-hati terhadap potensi tanah longsor dan pohon tumbang. (sai/vga)

**RADAR
SIDOARJO.ID**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kemeriahan dan bersemangat, hiburan Santri dan Festival UKM

Banyak Hiburan dan Hadiah

KEGIATAN Doa bersama, Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM yang digagas oleh Radar Sidoarjo berlangsung meriah di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Minggu (2/11) pagi. Ribuan warga turut serta dalam kegiatan yang berlangsung menyehatkan tersebut. Sejumlah pertunjukan menghibur peserta. Dan tentu saja ratusan hadiah yang disediakan panitia membuat warga senang.

BERUNTUNG: Bupati Sidoarjo Subandi memberikan hadiah pemenang undian sepeda.

SENANG: Ribuan peserta Mlaku Bareng Santri mengikuti jalan sehat dengan gembira.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AGAR PENGENDARA TAK MELINTAS: Kursi, traffic cone, dan spanduk diletakkan di Jalan Raya Trosobo kemarin. Jalur nasional Krian-Surabaya ditutup sementara selama proyek dikerjakan.



Jalan Raya Trosobo Dilebarkan, Jalur Krian-Surabaya Ditutup

Akses

Surabaya-Krian
Sudah Dibuka

SIDOARJO – Pengerajan proyek pelebaran jembatan atau saluran air di Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman, terus digarap. Sisi selatan di jalur Surabaya-Krian sudah selesai. Kali ini, proyek dilanjutkan ke sisi utara pada jalur Krian-Surabaya. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati saat melintas. Sebab selama pengerajan, jalur ke timur yang mengarah ke Surabaya di-

tutup sementara. Ada pembenaran sistem *contra flow* atau arus dua arah di jalur Surabaya-Krian.

Mendoro Agung mengatakan, pengerajan jembatan di sisi utara dimulai sejak Sabtu (1/11). Saat ini proses sudah memasuki tahap penggalian pondasi dan pelebaran struktur utama. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan, tapi pekerjaan ini harus segera diselesaikan demi memperlancar arus kendaraan," jelas Agung. Penutupan jalur arah

Krian-Surabaya memang berpotensi menyebabkan kemacetan. Kendaraan harus bergantian melintas. Ada kepadatan arus saat jam berangkat dan pulang kerja.

Atasi Banjir di Trosobo dan Bringinbendo

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, gorong-gorong di bawah jalan raya Taman akan diganti dan diperlebar untuk memperlancar aliran air. "Ini kebutuhan penting untuk mengurangi banjir di wilayah Bringinbendo dan sekitarnya."

Dwi Eko Saptono
Kepala DPUBMSDA Sidoarjo
Ini kebutuhan penting untuk mengurangi banjir di wilayah Bringinbendo dan sekitarnya," ujarnya. Menurut Dwi, proyek ini

bukan hanya untuk memperbaiki akses jalan, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang mengatasi genangan di kawasan Trosobo dan Bringinbendo. "Kalau crossing drainase ini sudah dibenahi, daya tampung saluran lebih besar dan air bisa mengalir lancar," ujarnya.

Gara-gara penyempitan drainase, banjir memang sering kali melanda kawasan Trosobo. Ada tiga desa yang langganan banjir. Sementara, Jalan Raya Trosobo merupakan jalur nasional yang banyak dilewati pengendara. (eza/hen)

Jawa Pos

Mayoritas Sekolah Swasta Ikut TKA Gelombang Kedua

Total Bakal Diikuti
25.170 Siswa

SIDOARJO – Pelaksanaan Tes Keagamaan dan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK dan MA di Kabupaten Sidoarjo mulai bergulir. Sejumlah sekolah negeri telah memulai ujian sejak kemarin (3/11). Untuk sekolah swasta, mayoritas ikut gelombang kedua. Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Sidoarjo Kiswanto mengatakan bahwa hampir semua SMA dan SMK negeri di



JADI LOKASI TKA: SMANOR Jatim memulai penyelenggaraan Tes Keagamaan dan Akademik. Ada banyak sekolah ikut gelombang kedua.

Sidoarjo telah mengikuti TKA pada gelombang pertama. Pelaksanaan dilakukan secara daring (online) di masing-masing sekolah. "Cuma dua sekolah negeri yang belum, yakni SMAN 1 Sidoarjo dan SMAN 2 Sidoarjo," ujarnya.

Selain negeri, dispendik juga memantau TKA di sekolah swasta. Sebagian besar sekolah baru menjalankan TKA pada gelombang kedua. Salah satunya alasannya agar proses persiapannya lebih panjang.

Menurut Kiswanto, ujian TKA

kali ini diikuti sebanyak 25.170 siswa dari SMA dan SMK negeri maupun swasta. Salah satu sekolah yang telah melaksanakan TKA lebih awal adalah SMAN Olahraga (SMANOR) Jatim di Sidoarjo.

Kasi Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo Ahmad Fathoni mengungkapkan, terdapat 24 MA yang ikut TKA pada gelombang pertama dan 17 MA pada gelombang kedua. "Dari total itu, delapan madrasah melaksanakan ujian dalam dua gelombang," jelasnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PADAT: Arus lalu lintas tampak ramai di perempatan Pagerwojo.

Durasi Traffic Light di Pagerwojo Ditambah 20 Detik

SIDOARJO – Banyak pengendara yang mengeluhkan kemacetan di perempatan Pagerwojo. Merespon keluhan, polisi mengatur ulang lampu traffic light (TL).

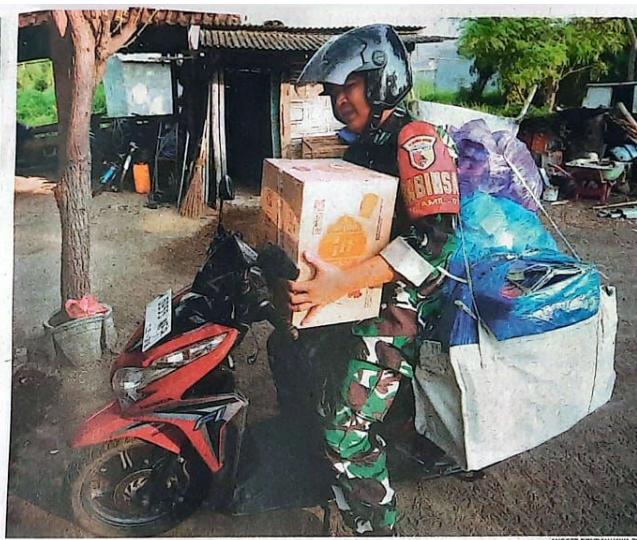
Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Jodi Indrawan menjelaskan, penyesuaian tersebut dalam rangka memastikan kelancaran arus lalu lintas. Terlebih, pada jam sibuk seperti pagi dan sore. Menurut Jodi, periode lampu hijau sebelumnya 60 detik. Durasinya saat ini ditambah 80 detik agar kendaraan dari barat dan timur punya waktu lebih banyak. (edi/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KAWAL SAMPAI
PELOSOK: Guru SD
Negeri Sawahan 2
Achmad Fadoli dan
Anggota Babinsa
Koramil Buduran
Serta Kliman
mengirimkan
63 paket MBG
ke Dermaga Perum
Bervara, Buduran,
kemarin (3/11). Foto
kanan, Serda Kliman
mengambil paket
siap santap dan
makanan kering itu
dari SPPG Dukuh
Tengah untuk
persediaan tiga hari.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Menu MBG Dikirim Lewat Perahu untuk Stok Tiga Hari Langsung

Distribusi Makanan
Siap Santap Senin dan Kamis

SIDOARJO—Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk tiga sekolah di Dusun Kepetingan, Desa Sawahan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, harus didistribusikan dengan perahu untuk mempercepat waktu. Sebab, distribusi lewat

jalur darat bisa sampai 1,5 jam. Sedangkan dengan perahu hanya perlu 45 menit. Guru SDN Sawahan 2 Budur

an Achmad Fadoli mengatakan, MBG di Desa Sawahan itu sejak 12 Oktober. Awalnya dikirim setiap hari melalui pe-

matang tambak oleh tim dari Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dan aparat TNI ■

Baca Jalur... Hal 19

Jawa Pos

Menu MBG Dikirim Lewat Perahu untuk Stok Tiga Hari Langsung

Sambungan dari hal 13

"Akhirnya diputuskan menggunakan jalur air dengan perahu agar lebih cepat dan aman," ujarnya kemarin (3/11).

Setelah beralih ke jalur air, sistem pengiriman juga sempat berubah-ubah. Awalnya setiap hari, kini diubah menjadi dua kali sepekan. "Kalau tidak salah untuk memangkas biaya perjalanan dan biar lebih efektif," katanya.

Pada Senin, para petugas mengirim makanan basah seperti

nasi, lauk, dan sayur. Serta stok makanan kering dan susu untuk konsumsi siswa pada Selasa dan Rabu. "Jadi makanan dikirim setiap Senin dan Kamis. Hari Senin stoknya untuk sampai Rabu, terus nganter lagi Kamis," ujarnya.

Sementara itu, Babinsa Koramil Buduran Serda Kliman yang turut membantu distribusi menjelaskan, pengiriman dilakukan dari SPPG Dukuh Tengah ke tiga lokasi penerima, yakni SDN Sawahan

2 Buduran, SMPN Satu Atap Buduran, dan PAUD di Dusun Kepetingan. "Totalnya ada 63 porsi makanan setiap kali pengiriman," katanya.

Keterlibatan Babinsa itu bentuk dukungan terhadap program nasional MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. "Kami bantu memastikan semua anak di daerah terpencil seperti Kepetingan tetap menerima hak yang sama untuk gizi dan pendidikan," ujarnya. (eza/jun)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RANGKAIAN HSN BUPATI SIDOARJO SUBANDI LEPAS RIBUAN PESERTA MLAKU BARENG SANTRI

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Ribuan peserta memadati kawasan Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Minggu pagi (2/11). Kegiatan Doa Bersama, Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM 2025 digelar meriah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

Bupati Sidoarjo, Subandi hadir dan secara resmi memberangkatkan peserta Mlaku Bareng Santri. Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan semangat perjuangan para santri.

Dia mengatakan, Mlaku Bareng Santri bukan sekadar kegiatan jalan sehat. Namun juga momentum memperkuat persatuan dan menumbuhkan semangat gotong royong.



"Mlaku bareng santri adalah simpul kebersamaan dan semangat perjuangan, festival UMKM menjadi bukti bahwa ekonomi kerakyatan tumbuh dari bawah, dari tangan-tangan kreatif masyarakat kita," ucapnya saat sambutan.

Menurutnya, santri masa ini tak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Dia menyebut santri sebagai agen perubahan yang turut berkontribusi membangun

Kota Delta.

"Hari Santri ini menjadi momentum bagi para santri untuk berdakwah, berwirausaha, dan membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan terang," ujarnya.

Bupati juga mengajak masyarakat menjaga semangat persatuan dalam membangun daerah. Dia menegaskan, kemajuan Sidoarjo menjadi tanggung jawab bersama.

"Jangan saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan, jangan hanya menuntut, tapi mari ikut berbuat yang baik," tegasnya.

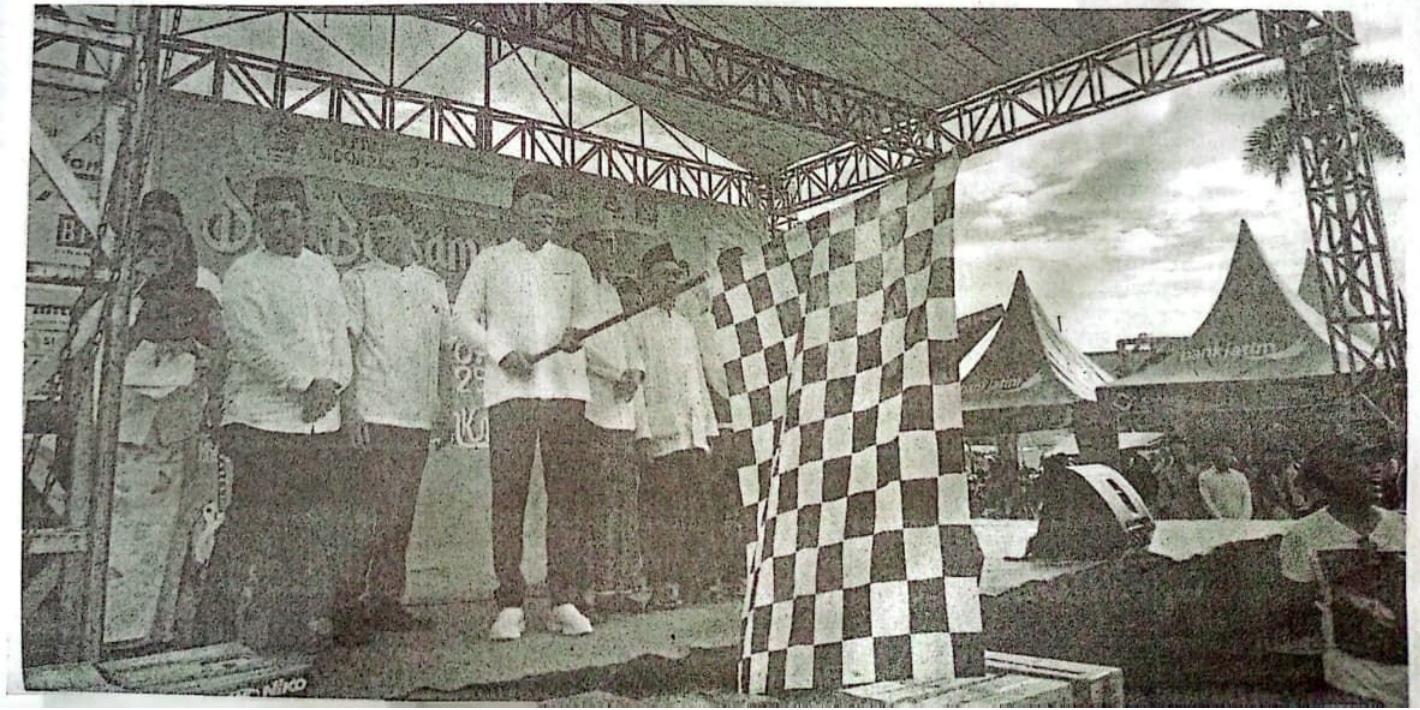
Subandi menilai kegiatan yang digagas Media Sidoarjo ini juga menggerakkan ekonomi lokal. Melalui Festival UMKM, masyarakat

diajak mendukung produk usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memberikan apresiasi kepada Media Sidoarjo atas kontribusi dan kolaborasinya. Baginya media lokal Sidoarjo memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

"Kami dari DPRD Sidoarjo memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Radar Sidoarjo, bukan hanya melalui pemberitaan, tapi juga lewat aksi nyata seperti kegiatan Hari Santri ini," katanya.

"Kami berharap, kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan media terus terjalin, kami yakin ini dapat memperkuat identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri," pungkasnya. (Khol/Dy)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Mimik Ajak APKLI Sidoarjo Manfaatkan KURDA

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, mengajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tergabung dalam anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Sidoarjo untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) di BPR Delta Artha Sidoarjo.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Senam Pagi Sehat Gembira dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di area parkir Transmart Sidoarjo, pada Minggu (2/11/2025).

Mak Mimik, sapaan akrabnya, mengatakan program KURDA tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo bagi pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan modal.

"Kalau ada kesulitan permodalan, silakan ajukan pinjaman melalui Bank Delta Artha Sidoarjo. Pemerintah daerah menyiapkan pinjaman dengan bunga ringan khusus bagi UMKM," ujarnya.

Ia menjelaskan, program pinjaman KURDA di BPR

Delta Artha memberikan bunga 2 persen per tahun atau sekitar 0,16 persen per bulan, dengan plafon Rp5 juta hingga Rp10 juta tanpa jaminan.

"Melalui dukungan permodalan yang mudah dan ringan, kita ingin UMKM di Sidoarjo semakin tumbuh dan mandiri," pungkasnya.

Wabup berharap kemu-

dahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya.

"Saya titip pesan, kalau sudah mendapatkan modal pinjaman, dimanfaatkan yang baik, perhatikan packagingnya, pemasaran saat ini juga bisa melalui digital/online," tutupnya. (Khol/Dy)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



80 Desa Gelar Pilkades Serentak

SIDOARJO, SURYA - Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak kembali digelar di Kabupaten Sidoarjo. Sedikitnya ada 80 desa yang dijadwalkan menggelar Pilkades serentak tahun 2026 besok.

Dalam pelaksanaannya, tahapan Pilkades bakal dimulai 1 Desember 2025 untuk masa persiapan sampai 13 Januari 2026. Kemudian tahapan pencalonan berlangsung pada 14 Januari hingga 23 April 2026.

"Tanpa pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026. Kemudian penetapan hasil Pilkades dijadwalkan pada 24 Mei hingga 29 Juni 2026," kata Bupati Sidoarjo Subandi, Senin (3/11).

Penetapan tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo.



SURYA/M TAUFIK

SUBANDI

Bupati Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo bersama Forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkades serentak nanti berjalan aman dan lancar. Berbagai hal disiapkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2026.

"Kami ingin Pilkades 2026 ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Subandi.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memastikan seluruh tahapan Pilkades 2026 akan berlangsung kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kami siap mengamankan di semua tahapan pada pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026 mendatang. Harapan kita semua, Pilkades berjalan aman, tertib, dan demokratis," ungkapnya. (ufi)

SURYA
Surabaya Post
About Your Local News



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dishub Maksimalkan Mobil Uji Layani KIR Keliling

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo maksimalkan mobil uji keliling demi melayani kebutuhan masyarakat setempat terkait layanan uji kendaraan bermotor berkala atau KIR oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan mobil uji keliling untuk memudahkan masyarakat yang selama ini terkendala antrean serta terkait jarak ke lokasi pengujian. "Mobil uji keliling ini bisa jadi solusi agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dishub," kata Mimik dalam keterangannya.

Menurutnya, semua alat uji di dalam

mobil uji keliling itu dinilainya lengkap seperti yang ada di kantor Dishub, seperti alat uji emisi, uji lampu, uji roda, uji ketebalan ban, hingga uji rem.

Ia juga menyampaikan jika program ini merupakan implementasi regulasi yang memperbolehkan uji KIR dilakukan di luar gedung pengujian dan langkah ini dinilai efektif untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meminimalkan antrean panjang di kantor Dishub.

Mimik menilai, dengan sistem jemput bola ini, masyarakat bisa mendapat layanan KIR di mana saja, tanpa mengurangi standar pengujian.

Sementara itu Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan pihaknya men-

catat rata-rata terdapat 15 hingga 20 kendaraan yang diuji setiap hari melalui mobil keliling.

Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut dapat meningkat tajam saat mobil tersebut mengunjungi area padat kendaraan seperti di kawasan industri atau terminal, yang jumlahnya bisa melonjak hingga 100-200 unit per hari.

Budi menambahkan bahwa kelulusan uji kendaraan tidak ditentukan oleh usia kendaraan, melainkan oleh kondisi teknis kendaraan tersebut. "Kendaraan tua belum tentu gagal uji, jika dirawat dengan baik, tetap bisa lulus. Tetapi jika ada komponen yang tidak sesuai, pemilik diberi waktu satu kali 24 jam untuk memperbaiki tanpa daftar ulang," katanya. (udi)



MOBIL KIR KELILING: Pemkab Sidoarjo maksimalkan mobil uji keliling demi melayani kebutuhan masyarakat setempat terkait layanan uji kendaraan bermotor berkala atau KIR oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KIRAB BUDAYA: Pemkab Sidoarjo mendukung harmoni dan kerukunan antarumat beragama di wilayah setempat dalam kegiatan kirab budaya yang digelar di Klenteng Tri Dharma Teng Swie Bio, Minggu, di Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Pemkab Dukung Harmoni dan Kerukunan Antarumat Beragama

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendukung harmoni dan kerukunan antar umat beragama di wilayah setempat dalam kegiatan kirab budaya yang digelar di Klenteng Tri Dharma Teng Swie Bio, Minggu, di Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi menilai kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya dan sejarah, sekaligus merupakan bentuk harmoni, toleransi, dan persaudaraan.

"Selain melestarikan budaya dan sejarah, kegiatan seperti ini juga dapat mempererat hubungan antar umat beragama di Sidoarjo agar selalu aman, damai, dan rukun," kata Subandi.

Subandi juga menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, kegiatan tersebut dinilai perlu untuk terus dilestarikan dan dijadikan sebagai salah satu agenda tahunan di Sidoarjo.

Hal itu, menurutnya, dapat menarik potensi wisatawan dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat hilai luhur persatuan, gotong royong, dan bhinneka yang menjadi kekuatan masyarakat Indonesia.

"Melestarikan budaya bukan hanya tugas komunitas tertentu, tapi tanggung jawab kita bersama. Dari budaya, kita belajar tentang nilai, sejarah, dan jati diri. Dari perjalanan kita, kita membangun masa depan yang lebih kuat dan bersatu," kata Subandi.

Ketua panitia kegiatan, Hengki, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk syukur para pengikut, sekaligus untuk memperingati ulang tahun Klenteng Tri Dharma Teng Swie Bio.

Menurutnya, dalam kegiatan tahun ini beragam elemen masyarakat seperti karang taruna, murid sekolah, hingga komunitas seni tradisional turut berpartisipasi. "Kami ingin menunjukkan kepada generasi muda bahwa kita masih punya nilai-nilai budaya yang harus dijaga," kata Hengki.

Ia berharap, kirab budaya di Klenteng Tri Dharma Teng Swie Bio tersebut dapat menjadi agenda tahunan untuk mempererat kebersamaan lintas agama dan budaya khususnya di wilayah Sidoarjo. (udi)

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jaga Stabilitas Pilkades Serentak 2026 di 80 Desa

Residivis Curanmor



RESIDIVIS. Pelaku curanmor yang ditangkap Polsek Balongpang-gang ternyata residivis kambuhan, kemarin.

Asal Lamongan Beraksi di Gresik

GRESIK- Residivis kambuhan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), AS (27) warga Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan ditangkap jajaran Polda Gresik karena mencuri motor Honda Vario

DUTA
MASUKKAR

Pemkab Sidoarjo

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Sebanyak 80 desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Penetapan itu tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangi oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.Pd., M.M., Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo Senin siang (3/11/25).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, tahapan Pilkades serentak akan dimulai dengan masa persiapan pada 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Tahapan pencalonan berlangsung 14 Januari hingga 23 April 2026, disusul pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026, dan penetapan hasil Pilkades dijadwalkan 24 Mei hingga 29 Juni 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkades agar berjalan aman dan lancar.

"Kami ingin Pilkades 2026 ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati Subandi saat memberi-



Rapat Persiapan Pilkades tahun 2026 di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Senin (3/11/25).

kan arahan pada Rapat Persiapan Pilkades Tahun 2026 di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Senin siang (3/11/25).

Bupati juga menambahkan bahwa

sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan.

"Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi mo-

mentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa," lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing memastikan seluruh tahapan Pilkades 2026 akan berlangsung kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, keterlibatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami siap melakukan pengamanan selama pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026 mendatang," tegasnya.

Selain itu, untuk desa yang hanya memiliki satu calon kepala desa, pelaksanaan Pilkades di desa tersebut akan ditunda hingga terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kader Posyandu Ujung Tombak Deteksi Dini Penyakit

SIDOARJO – Upaya pencegahan kanker leher rahim terus digencarkan melalui program pemeriksaan HPV DNA yang kini mulai diperluas hingga tingkat desa. Pemeriksaan ini dinilai sebagai langkah efektif dalam deteksi dini kanker serviks, sekaligus bentuk edukasi agar perempuan lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi.

Salah satu wilayah yang menjadi pelaksana pilot project pemeriksaan HPV DNA adalah Puskesmas Wonoayu, dengan Desa Pilang sebagai lokus terpilih. Program ini telah berjalan sejak Januari 2025 dan direncanakan berlangsung selama sepuluh bulan.

Kepala Puskesmas Wonoayu, drg. Lailatul Mufida, kepada Duta Masyarakat Senin (3/11/25) menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diawali dengan berbagai tahap persiapan, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga pelatihan kader kesehatan desa.

"Program ini dimulai dari tahap persiapan, baik dari sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga pelatihan kader kesehatan desa," terangnya.



LOETI/DUTA

Puskesmas Wonoayu pilot Project pemeriksaan HPV DNA di Desa Pilang

Ia merinci, dari sisi sarana dan prasarana, dilakukan dropping alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Sementara dari sisi SDM, Puskesmas melatih dua unsur penting, yakni:

Kader kesehatan Desa Pilang, yang dilatih dalam komunikasi antarpribadi (KAP) agar mampu melaksanakan tugas mengajak dan mengedukasi masyarakat terkait

pentingnya pemeriksaan HPV DNA.

Lebih lanjut, drg. Lailatul Mufida mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat.

"Sebagian warga masih menolak atau enggan diperiksa karena berbagai alasan, seperti rasa malu, takut, tidak punya waktu karena bekerja, tidak tahu manfaat pemeriksaan, atau bahkan belum mendapat izin dari suami," ujarnya.

Sebagai solusi, pihaknya melakukan berbagai pendekatan. Diantaranya Edukasi dan sosialisasi melalui kegiatan masyarakat seperti pengajian, arisan, serta pertemuan RT dan RW. Kerja sama dengan pemerintah desa dan pihak swasta, terutama pabrik yang banyak mempekerjakan perempuan, sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan di tempat kerja.

drg. Lailatul Mufida berharap kesadaran perempuan semakin meningkat terhadap pentingnya pemeriksaan HPV DNA. • Loe



DUTA
MASYARAKAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PERTAMINA PERPANJANG POSKO PENGADUAN BBM DI JATIM

Publik Berhak Gugat soal Kualitas BBM

■ Ramai soal Pertalite, Bahlil Lapor Prabowo Masalah Solar

Jakarta-HARIAN BANGSA

Pertamina Patra Niaga memperpanjang waktu posko pengaduan kendaraan bermotor tersendat atau 'brebet' di wilayah Jawa Timur hingga 10 November mendatang.

Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional

Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan kebijakan itu dilakukan Pertamina dengan pertimbangkan kendala yang dialami konsumen.

"Jadi sementara kami akan perpanjang posko aduan sampai tanggal 10 November mendatang," kata Minggu, Senin (3/10).

❖ Bersambung ke Hal. 11

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

• Publik...

Sambungan dari halaman 1

Sejak dibukanya posko aduan, Selasa (28/10), Pertamina Patra Niaga telah menampung ratusan laporan kendaraan yang brebet di seluruh area Jawa Timur. Wilayah yang paling terdampak terdapat di Bojonegoro. "Mayoritas masih didominasi sepeda motor, tapi ada juga laporan dua mobil yang brebet di Surabaya dan Kediri," tambahnya.

Lebih lanjut Ahad mengatakan rata-rata jenis aduan kendaraan bermotor yang brebet, khususnya sepeda motor, yang diterima pihaknya mayoritas selaras. Yakni, tarikan gas sepeda motoryang tersendat dan tidak lancar.

Usai laporan tersebut masuk, Ahad mengaku pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan kalkulasi mengenai pemberian ganti rugi, juga menimbang hasil uji lab sampel BBM, dan perkiraan estimasi masing-masing kasuistik di tiap-tiap SPBU.

"Jadi nanti untuk pemberian kompensasi akan menunggu hasil uji lab sampel BBM dan perkiraan estimasi masing-masing kasus per SPBU," ujar Ahad.

Sebagai langkah preventif, Ahad pun mengimbau kepada segenap masyarakat untuk senantiasa meminta dan menyimpan bukti pembelian BBM atau perbaikan di bengkel, agar nantinya dapat dilaporkan ke masing-masing SPBU bila terdapat kendala yang dialami usai mengisi BBM.

Sejak fenomena kendaraan brebet yang diduga terjadi usai mengisi BBM jenis Pertalite, Ahad menyebut penjualan Pertamax belum mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, penjualan Pertalite juga belum mengalami penurunan.

"Tapi kalau di SPBU pusat kota, mungkin sudah ada kenaikan [pembelian BBM Pertamax] itu. Hanya belum besar," pungkas Ahad.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra memastikan pihaknya akan memberikan atensi serius terhadap isu dugaan BBM jenis Pertalite yang tercampur air.

"Terkait isu kontaminasi air di BBM Pertalite yang disalurkan di SPBU, kami dari Pertamina Patra Niaga tentunya all out dan memberikan atensi serius agar hal ini jangan sampai menimbulkan keresahan

apalagi menimbulkan kerugian kepada masyarakat," ucap Mars Ega dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/11).

Mars Ega juga memastikan berdasarkan hasil pemeriksaan ratusan SPBU di Jawa Timur, tidak ditemukan adanya pencampuran BBM jenis Pertalite dengan kontaminan seperti air.

"Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut," kata Mars Ega.

Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPO) Jawa Timur, Said Sutomo, menggaskan bahwa masyarakat memiliki hak hukum untuk menuntut PT Pertamina (Persero) apabila badan usaha tersebut tidak melakukan pembuktian terbalik terkait dugaan penurunan kualitas BBM jenis Pertalite yang disebut-sebut menjadi penyebab mogok massal kendaraan di sejumlah wilayah Jawa Timur.

?Menurut Said, dalam konteks perlindungan konsumen, Pertamina sebagai pelaku usaha wajib membuktikan bahwa produk yang beredar telah sesuai dengan standar mutu dan aman digunakan.?

?Jika Pertamina tidak bisa membuktikan bahwa BBM-nya sesuai spesifikasi, maka masyarakat berhak menuntut. Itu sudah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," ujar Said Sutomo saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (3/11/2025).?

Said menambahkan, pembuktian terbalik merupakan mekanisme hukum yang memberikan pembuktian kepada pelaku usaha, bukan konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab ada di pihak Pertamina untuk memastikan produk BBM yang dijual tidak menimbulkan kerugian publik.

?Kalau terbukti ada unsur kelalaian atau mutu produk tidak sesuai standar SNI, konsumen berhak meminta ganti rugi, bahkan bisa menempuh jalur hukum," tegasnya.

?Sejumlah laporan dari masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto menyebutkan banyak kendaraan mendadak mogok setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU. Kondisi itu menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap produk BBM bersubsidi tersebut.?

?Kami akan dorong dilakukan uji laboratorium independen. Jika terbukti ada penurunan kualitas, Pertamina harus bertanggung jawab secara moral dan hukum," tuturnya.?

?Ia juga meminta Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hili Migas (BPH Migas) segera turun tangan untuk melakukan investigasi terbuka. Transparansi hasil uji, menurutnya, menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

D sisi lain, alih-alih melaporkan persoalan BBM Pertalite yang diduga menjadi penyebab banyaknya sepeda motor mogok di Jawa Timur kepada Presiden Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia justru menyampaikan bahwa Indonesia akan berhenti melakukan kegiatan impor Bahan Bakar jenis solar pada tahun 2026.

Hal ini didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) pada 10 November 2025 ini.

?Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, insyaAllah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaAllah 10 November ini akan kita resmikan," kata Bahlil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Bahlil menjelaskan, pemerintah juga mendorong pemberlakuan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50.

?Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk kita bisa suplai, kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. "Ada dua, B50 tetap kita dorong. Jadi kalau bisa kita, kalau lebih kita ekspor," ujar Bahlil.

Terkait seberapa besar dampak proyek RDMP Balikpapan dalam menekan impor solar, Bahlil mengaku masih melakukan hitung-hitungan. Dia menilai apabila kilang RDMP beroperasi disusul imple-

?Kita lagi hitung, tapi yang jelas kita targetkan RDMP jadi, B50 jadi, kita akan over supply untuk solar," jelas Bahlil.

Diketahui, Bahlil Lahadalia belakangan menjadi sorotan publik terkait dua isu utama yang menyangkut BBM jenis Pertalite, yaitu dugaan penurunan kualitas di beberapa daerah dan masalah ketidakpastian sasaran subsidi.

Dia pun telah memberikan klarifikasi tegas dan mengambil langkah cepat menanggapi keresahan masyarakat terutama di Jawa Timur,

mengenai dugaan kualitas Pertalite yang menyebabkan motor brebet atau mogok, direspon langsung oleh Menteri Bahlil dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU.

Bahlil langsung memimpin tim investigasi yang melibatkan Ditjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Hasil uji laboratorium dari sampel Pertalite yang diambil di SPBU, termasuk di Malang, diklaim sesuai dengan standar Mutu Nasional dan baik untuk digunakan.

Meskipun hasil uji awal menunjukkan kualitas standar, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan main-main. Ia memberikan peringatan keras kepada Pertamina Patra Niaga untuk menjalin kualitas produksi di lapangan.

?Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main ya. Saya nggak main-main. Kalau benar terbukti, akan diberikan sanksi tegas. Tapi jika belum terbukti kesalahannya, masa mau dikenakan sanksi? Tunggu dulu, kita lihat hasilnya nanti," tegas Bahlil.

Pemerintah juga meminta Pertamina untuk membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah pada kendaraannya setelah mengisi Pertalite, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas BBM bersubsidi yang berkualitas.

Selain itu kualitas, Bahlil Lahadalia juga berulang kali menyuarakan pentingnya perbaikan distribusi BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, agar lebih tepat sasaran.

Bahlil menekankan bahwa BBM bersubsidi, yang dibayari oleh negara, seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah yang berhak.

Ia secara eksplisit menyoroti fenomena pemilik mobil mewah yang masih menggunakan BBM bersubsidi, sebuah kondisi yang dinilai tidak adil.

?Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang (BBM) subsidi. Kalau kayak kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia, bos," ujar Bahlil dalam salah satu kesempatan.

Untuk mewujudkan subsidi yang tepat sasaran, pemerintah sedang memfinalisasi aturan pembatasan pengguna Pertalite dan Solar yang akan diatur melalui Peraturan Menteri ESDM (Permen). Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pendataan pengguna melalui sistem QR Code MyPertamina.(ccn/rol/tan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).

Harga BBM Berubah, Bensin Turun dan Solar Alami Kenaikan

HARGA BBM di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau mengalami perubahan ketika memasuki November 2025 dengan jenis bensin mengalami penurunan harga di sejumlah SPBU dan solar naik di seluruh SPBU.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamina Dex Series pada November 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Oktober 2025.

❖ Bersambung ke Hal. 11

• Harga BBM...

Sambungan dari halaman 1

Seperti di Jabodetabek, harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp13.900 per liter dari Rp13.700 per liter.

Lalu, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp14.200 per liter, naik dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter.

Sedangkan, harga Pertamax Series tak mengalami perubahan.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina disebutkan; Harga Pertalite Rp10.000 per liter; solar subsidi Rp6.800 per liter; Pertamax Rp12.200 per liter; Pertamax Turbo Rp13.100 per liter; Pertamax Green Rp13.000 per liter; Dexlite Rp13.900 per liter; dan Pertamina Dex Rp14.200 per liter.

Lebih lanjut, pada SPBU Shell, BBM jenis bensin seperti Shell Super turun menjadi Rp12.680 per liter dari Rp12.890 per liter pada Oktober.

Namun, BBM jenis solar (Shell

V-Power Diesel) mengalami peningkatan dari Rp14.270 per liter pada Oktober 2025, menjadi Rp14.410 per liter mulai 1 November 2025.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah; Harga Super Rp12.680 per liter; V-Power Rp13.260 per liter; V-Power Diesel Rp14.410; serta V-Power Nitro+ Rp13.480 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell, yakni penurunan

harga BBM jenis bensin dan peningkatan harga BBM jenis solar.

Rincian harga BBM di SPBU BP: Harga BP Ultimate Rp13.260 per liter; BP 92 Rp12.680 per liter, dan BP Ultimate Diesel Rp14.410 per liter.

Berbeda dengan SPBU lainnya, Vivo hanya memperbarui harga BBM jenis solar. Sejak 15 Oktober 2025, SPBU Vivo telah kehabisan stok BBM jenis bensin. Harga BBM di SPBU Vivo yakni Diesel Primus Plus Rp14.410 per liter. (kcm/rol/lan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Antisipasi Macet, Pola TL Simpang McD Juanda Diubah

Sidoarjo, Memorandum

Kemacetan di kawasan Bandara Juanda dan sekitarnya terus menjadi perhatian serius Satlantas Polresta Sidoarjo. Salah satu cara antisipasi dan mengurangi antrean panjang kendaraan, satlantas bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo melakukan rekayasa pengaturan lampu lalu lintas (APILL) di Simpang McDonald Juanda.

Rekayasa traffic light (TL)

bahkan diuji coba sejak Jumat (31/10) sore sebelum resmi diterapkan Sabtu pagi. Langkah ini merupakan hasil evaluasi kepadatan lalu lintas yang kerap memuncak pada jam keberangkatan dan kedatangan di Bandara Juanda.

ra Juanda.

Perubahan paling mencolok ada pada durasi lampu hijau di beberapa arah. Pada jam sibuk 06.00–09.00 dan 16.00–21.00, waktu menyalakan diperpanjang terutama untuk jalur Surabaya-Sidoarjo dan Juanda-Allohayang

sering jadi titik macet.

Dari arah Surabaya ke Sidoarjo, durasi hijau naik dari 30 detik menjadi 60 detik, menyesuaikan volume kendaraan yang meningkat di jam keberangkatan pesawat. Kasatlantas Kompol Jodi Indrawan mengatakan, langkah ini merupakan strategi konkret mengurangi kemacetan.

"Rekayasa APILL ini hasil evaluasi mendalam. Kami sesuaikan durasi lampu hijau di jam padat agar arus kendaraan lebih lancar, terutama menuju Bandara Juanda," ujar Kompol Jodi. ia menambahkan, jika ma-

sih ada titik yang macet akan dievaluasi lagi agar pengguna jalan nyaman dan lancar dalam perjalannya.

Kabid Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwi Tjahjo Mardisunu mengungkap, rekayasa ini hasil kolaborasi lintas instansi demi pelayanan publik yang lebih baik. "Juanda adalah titik vital transportasi. Kami ingin pengguna jalan benar-benar merasakan perubahan ini secara nyata," ujarnya. Langkah ini diharapkan membawa perubahan besar dalam kelancaran arus kendaraan di kawasan itu. (san/epe)



Personel satlantas dan petugas dishub memantau arus lalu lintas.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LOETH/DUT

Pedagang makanan Ibu Juhriyah, warga Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/11/25)

Satgas TMMD Borong Dagangan Ibu Juhriyah

SIDOARJO - Terlihat sepele namun sangat berarti. Ungkapan itu pas disematkan kepada Satgas TMMD yang di sela waktu istirahatnya memborong dagangan warga yang melintas. Wujud kepedulian prajurit TNI terhadap masyarakat kembali terlihat di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo.

Saat beristirahat di sela kegiatan, para anggota Satgas TMMD memborong habis dagangan makanan ringan milik Ibu Juhriyah, warga Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu

(1/11/25).

Aksi spontan tersebut membuat Ibu Juhriyah terharu. Dengan wajah sumringah, ia mengucapkan terima kasih kepada para prajurit yang telah membantu menambah rezekinya hari itu.

"Alhamdulillah, dagangan saya diborong habis sama bapak-bapak tentara. Terima kasih banyak, semoga bapak-bapak sehat selalu dan lancar tugasnya," ujar Ibu Juhriyah dengan mata berkaca-kaca.

Salah satu anggota Satgas TMMD mengatakan, tindakan sederhana ini merupakan wujud kepedulian dan kedekatan TNI dengan masyarakat

di sekitar lokasi kegiatan.

"Kami ingin keberadaan Satgas TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga memberi manfaat langsung bagi warga. Dengan membeli dagangan mereka, setidaknya bisa ikut membantu perekonomian masyarakat," katanya.

Program TMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo terus berlangsung dengan semangat gotong royong antara TNI dan warga. Selain pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian penting dalam mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab dan Baznas Sidoarjo

Salurkan Santunan Rp 10 Juta Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny

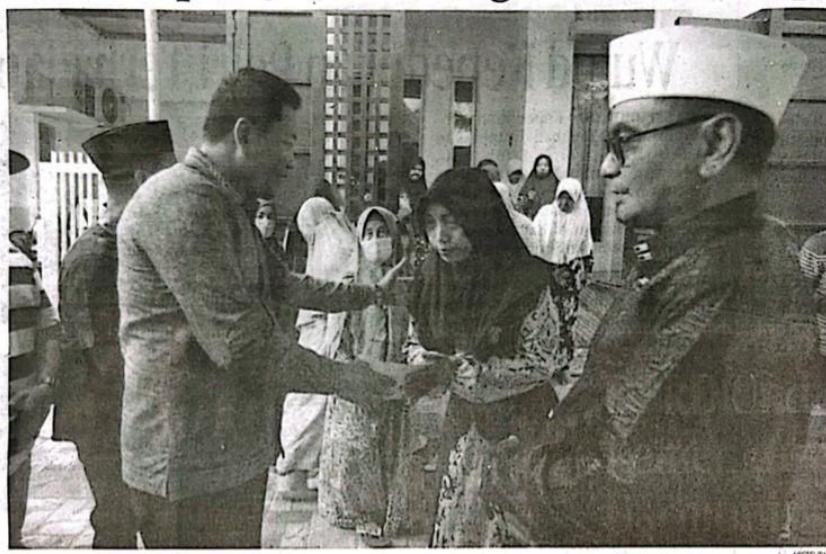
SIDOARJO — Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan bantuan kepada enam keluarga korban meninggal dunia akibat musibah reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sabtu,(1/11/25). Penyerahan bantuan dilakukan langsung di kediaman masing-masing korban. Bupati hadir didampingi Baznas, Dinas Sosial, serta para camat setempat.

Enam keluarga penerima bantuan tersebut yakni keluarga Mohammad Abdul Rohman Nafis asal Sedati, keluarga M. Muhib Alfian dari Buduran, keluarga Moh. Rizki Maulana Saputra dari Buduran, keluarga Fairuz Shirojuddin dari Tulangan, keluarga Irham Ghifari dari Krian, serta keluarga Moch. Adam Fidiansyah dari Sukodono.

Dalam kesempatan itu, Subandi menyampaikan rasa duka mendalam dan belasungkawa atas musibah yang menimpa para santri.

"Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan selalu tabah. Ananda-ananda yang sudah almarhum ini merupakan pahlawan santri kita, berjuang di pondok pesantren dan meninggal dalam keadaan syahid," ucapnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo bersama Baznas menyalurkan



Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Baznas serahkan bantuan kepada enam keluarga korban runtuhnya Ponpes Al-Khoziny. Sabtu(1/11/25)

santunan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing keluarga korban. Selain itu, pekan depan juga akan disalurkan bantuan pembangunan untuk Pondok Pesantren Al Khoziny senilai Rp1 miliar.

"Ini bentuk tanggung jawab moral kita semua. Kami ingin pondok segera bangkit dan kembali beraktivitas agar anak-anak bisa kembali belajar dengan aman," ujarnya.

Subandi menegaskan, pemerintah daerah akan terus hadir memberikan pendampingan dan bantuan kepada pihak pesantren maupun keluarga korban.

"Tentunya hal ini menjadi bentuk support, dukungan, dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Sementara itu, Jayanti Mandasari, ibu dari almarhum M. Muhib Alfian, menyampaikan keikhlasannya atas kepergian sang anak.

"Mugi-mugi anak saya husnul khatimah dan bahagia di surga. Sejak mondok, perubahannya bagus sekali. Saya ikhlas, saya ridho, nak. Sampean dikasih istimewa sama Allah, nggak semua orang meninggal dalam keadaan sujud dan suci," tuturnya dengan linangan air mata Sabtu sore(1/11/25).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Subandi juga membagikan beras kepada warga sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. • Loe

DUTA
MEDIAPRINT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Subandi meneken berita acara Pilkades serentak tahun 2026. foto Ist

80 Desa Ikuti Pilkades Serentak Tahun Depan

Pemungutan Suara Dijadwalkan 24 Mei 2026

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Sebanyak 80 desa di Kabupaten Sidoarjo bakal mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026.

Pemkab Sidoarjo menetapkan pelaksanaan hajatan demokrasi tingkat desa itu dalam berita acara yang ditandatangan oleh Forkopimda Sidoarjo, di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (3/11).

Pilkades serentak Tahun 2026 ini ditetapkan dengan sejumlah tahapan, yakni masa persiapan 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Disusul pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026.

Sementara itu, tahap penetapan hasil Pilkades dijadwalkan pada 24 Mei hingga 29 Juni 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkades agar berjalan aman dan lancar.

"Kami ingin Pilkades 2026 ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang

sehat dan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," cetus Subandi.

Ia menambahkan, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan.

"Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa," tandasnya.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memastikan seluruh taha-

pan Pilkades 2026 akan berlangsung kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kami siap melakukan pengamanan pada saat Pilkades serentak tahun 2026 mendatang," ungkapnya.

Sementara itu, dalam hal terdapat desa dengan hanya satu calon kepala desa, pelaksanaan Pilkades serentak di desa tersebut akan ditunda hingga terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (sta/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Silpa Meningkat, DPRD Sidoarjo Kritik Habis APBD 2025, Desak APBD 2026 Pro Rakyat



Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana rapat paripurna DPRD Sidoarjo pada Sabtu (1/11/2025), berlangsung hangat sekaligus menegangkan. Dalam forum resmi yang dihadiri 28 anggota dewan dan dinyatakan quorum oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, Fraksi gabungan Partai NasDem-Demokrat tampil berani menyuarakan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi gabungan ini tampil podium membacakan sekaligus mewakili pandangan umum para fraksi DPRD Sidoarjo.

Juru Bicara Fraksi NasDem-Demokrat, Muh. Zakaria Dimas Pratama, menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 belum mampu mencerminkan semangat kemandirian fiskal. Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan Pemkab terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang seharusnya bersifat insidental.

“Penerimaan pembiayaan tahun 2026 masih bergantung pada SiLPA yang mencapai ratusan miliar rupiah. Ini mencerminkan lemahnya disiplin fiskal dan buruknya manajemen kas daerah,” ujar Dimas lantang di hadapan peserta sidang Menurutnya, SiLPA yang terus tinggi menjadi sinyal kuat bahwa daerah belum optimal dalam menyerap anggaran pembangunan.

Ia menilai kondisi ini menghambat perputaran ekonomi masyarakat, karena proyek-proyek strategis justru tertunda realisasinya. “SiLPA besar itu berarti ada dana yang mengendap, sementara rakyat menunggu hasil pembangunan. APBD harus jadi obat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Zakaria Dimas yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo.

Ia juga mengingatkan, penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat bukan alasan untuk bersikap pesimistik. Sebaliknya, hal ini harus menjadi momentum kebangkitan fiskal daerah. “Kita ini daerah penyangga Surabaya, potensi PAD kita besar. Saat transfer pusat turun, justru itu saatnya menggali sumber daya lokal dan memperkuat basis pendapatan daerah,” serunya.

Oleh karenanya, DPRD mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar lebih cermat dan transparan dalam perencanaan anggaran.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DLHK Sidoarjo Tegur Kontraktor Proyek Alun-Alun yang Molor 11,8 Persen dari Target



Sidoarjo – Pembangunan [Alun-alun Sidoarjo](#) mengalami keterlambatan pekerjaan. Yang awalnya ditarget akhir November rampung, namaknya sulit tercapai. Data terbaru dari [Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan \(DLHK\)](#) Kabupaten Sidoarjo dari 27 Oktober-2 November 2025 seharusnya progres pekerjaan Alun-alun sudah mencapai 71,8 persen.

"Ya, realisasi capaian pekerjaan Alun-alun Sidoarjo baru 60,01 persen dari seharusnya 71,8 persen," beber Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau [Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan \(DLHK\)](#) Sidoarjo, Hery Santoso kepada [TIMES Indonesia](#), Senin (3/11/2025).

Hery sebutkan Hery Santoso mengatakan dengan capaian pekerjaan yang hanya 60,01 persen terjadi keterlambatan atau deviasi 11,8 persen.

DLHK Sidoarjo akan segera mengadakan Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan proyek konstruksi dengan pihak kontraktor pelaksana PT. Samudra Anugrah Indah Permai.

"Kami sudah kirimkan surat teguran 1 sampai 3 (kepada kontraktor pelaksana.red) tegas Hery.

Ia menambahkan bahwa salah satu penyebab terjadinya keterlambatan pekerjaan Alun-alun Sidoarjo karena dalam beberapa hari terakhir kerap terjadi hujan lebat di kota delta. DLHK Sidoarjo mengaku tetep menggelar rapat secara rutin setiap hari Selasa dan Minggu. Dalam rapat tersebut kontraktor diminta menambah tenaga kerja.

"Salah satu penyebabnya ya karena hujan. Tapi kami telah meminta untuk dilakukan penambahan personil tenaga kerja 162 orang," ungkapnya.

Pembangunan Alun-alun Sidoarjo yang dikerjakan PT. Samudra Anugrah Indah Permai menelan anggaran Rp24,6 miliar dan harus tuntas pada 15 Desember 2025.

Alun-alun Sidoarjo yang baru ini merupakan bagian dari program peningkatan ruang terbuka hijau dan kawasan ramah keluarga di pusat kota. Nantinya, alun-alun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya warga.

Dalam desain baru, alun-alun akan dilengkapi dengan area bermain anak, taman edukasi, ruang santai, serta jalur pedestrian yang lebih lebar. Ornamen khas Sidoarjo juga akan ditampilkan untuk memperkuat identitas daerah.

"Konsepnya lebih terbuka, bersih, dan ramah pengunjung. Kami ingin Alun-Alun Sidoarjo menjadi kebanggaan warga sekaligus destinasi wisata tengah kota," puangcas Hery. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih Apresiasi Mlaku Bareng Santri, Dorong Sinergi Pemerintah dan Media Bangun Kota Santri



Sidoarjo SMN — Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan Doa Bersama, Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM 2025 yang digelar di kawasan Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Minggu (2/11/25). Acara yang diikuti ratusan peserta tersebut diinisiasi oleh Radar Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Abdillah Nasih menilai kegiatan ini tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara media, pemerintah, dan pelaku usaha lokal dalam membangun Sidoarjo.

"Kami dari DPRD Sidoarjo memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Radar Sidoarjo. Bukan hanya melalui pemberitaan, tapi juga lewat aksi nyata seperti kegiatan Hari Santri ini," ujarnya. Menurut Abdillah Nasih, kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk memperkuat identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri. Ia berharap kemitraan antara DPRD, pemerintah daerah, dan media terus terjalin agar pembangunan dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. "Kami berharap kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan media terus terjalin. Kami yakin, sinergi ini dapat memperkuat identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri sekaligus mendorong ekonomi kerakyatan," tegasnya. Selain memberikan apresiasi, Abdillah Nasih juga menyoroti peran penting kegiatan Festival UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

"Festival UMKM seperti ini membuktikan bahwa kekuatan ekonomi Sidoarjo tumbuh dari bawah, dari tangan-tangan kreatif masyarakat kita," tambahnya. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi yang turut hadir dan melepas peserta Mlaku Bareng Santri menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya jalan sehat biasa, melainkan simbol kebersamaan dan semangat perjuangan para santri. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju.

Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi momentum penting memperingati Hari Santri Nasional sekaligus memperkuat kolaborasi antar-elemen masyarakat untuk mewujudkan Sidoarjo yang religius, berdaya saing, dan sejahtera. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembebasan Lahan Selesai, Pembangunan Frontage Road Tuntas di 2026



SIDOARJO | B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoario menargetkan pembangunan Frontage Road dari Waru sampai Buduran tuntas seluruhnya pada 2026 mendatang.

Target ini seiring keberhasilan pemkab mengurai persoalan yang menghambat pembangunan, yakni persoalan lahan makam desa.

"Pada 2026 sudah kita siapkan Rp 40 miliar. Untuk membangun jembatan dan jalan. Agar semuanya bisa selesai pada 2026," jelas Bupati Sidoario Subandi setelah rapat pembahasan pembangunan frontage road untuk kawasan Kedungrejo dan Waru, pada Senin (3/11/ 2025).

Rapat yang digelar di Ops Room Kantor Bupati Sidoario tersebut, antara lain melibatkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M. Ainur Rahman, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Dwi Eko Saptono, Perwakilan BPN Sidoario, SIG, hingga warga serta Pemerintah Desa Waru dan Kedungrejo.

Adapun persoalan lahan makam di kawasan waru itu ada dua. Pertama lahan makam Desa Krajan Kulon yang berada di dekat polsek setempat serta lahan makam Desa Kedungrejo di dekat stasiun Waru. Kendala kedua lahan makam itu yakni terkait pemindahan lahan.

Namun pada Senin siang, telah tercapai kesepakatan, baik antara pemerintah daerah dengan warga, maupun pemerintah desa setempat.

Termasuk, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada, Rabu (5/11/2025) mendatang, akan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan sebagai bentuk ganti rugi lahan makam. Nantinya, setelah pembayaran selesai, makam akan dilanjut proses pengukuran peta bidang.

"Yang di Waru sudah selesai. Kalau ada warga Waru yang meninggal sudah bisa dimakamkan di lahan makam baru," kata Bupati Subandi.

Sementara untuk lahan makam umum Desa Kedungrejo, dalam rapat tersebut juga sudah ada musyawarah desa terkait lahan pengganti.

"Ada tanah seluas 1.500 meter persegi di Kedungrejo Barat," tambah Bupati Subandi.

Sebelumnya sempat ada persoalan sertifikat dobel. Akhirnya sudah ada kesepakatan tentang proses hukum. Yaitu, ada proses di Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut sertifikat yang dobel itu.



Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemkab Sidoario menugaskan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoario Komang Rai Warmawan untuk mengawal proses tersebut.

"Agar pemerintah daerah dalam melakukan transaksi nanti tidak terganggu masalah hukum," terang Bupati Subandi.

Selain itu, Pemkab Sidoario juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Pemkab Sidoario. Bupati Subandi berharap pembangunan frontage road bisa segera tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat. Jalan pendamping sepanjang sekitar 9,4 kilometer itu bisa digunakan.

Semua persoalan lahan diharapkan tuntas pada 2025 ini. Jadi, pada 2026 mendatang, Pemkab Sidoario siap merampungkan seluruh pekerjaan fisiknya. Baik pembangunan jembatan maupun ruas jalan.

"Kami berharap frontage road bisa dilewati dari wilayah Waru hingga ke Sidoario pada 2026," tegasnya. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Kab. Sidoarjo Gelar Rapat Tertutup Polemik Pembongkaran Jalan Integrasi Antara Perumahan Mutiara City dan Mutiara Regency



SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Rapat Hearing dengan Ahli pakar Tata ruang dari ITS dan pakar hukum dari Unair pada kamis 30/10/2025, di ruangan rapat lantai dua DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Sidoario H. Abdillah Nasih di dampingi wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoario yaitu H.Kayan SH dari fraksi gerindra.H. Warih Andono.SH dari fraksi Golkar dan Suyarno SH dari fraksi PDI perjuangan sedangkan komisi A diantaranya ketua Rizza Ali Faizin MPDI Raimontara, ST Bambang Rivoko SE dan Komisi C yang hadir adalah. H.Khoirul Hidavat .SH. ketua komisi C dan wakilnya H.Anang Siswandoko ST, dll.Syaiful Aris pakar hukum pemerintahan dari Unair ketika di konfirmasi wartawan di luar ruang rapat menjelaskan kalau lahan jalan tersebut sudah diserahkan ke pemerintah harusnya jalan tersebut bisa dilewati siapa saja masalah kita ini serahkan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan.

Polemik pembongkaran jalan integrasi antara Perumahan Mutiara City dan Mutiara Regency akhirnya dibahas dalam rapat tertutup di DPRD Kabupaten Sidoario. Rapat tertutup tersebut turut menghadirkan pakar tata ruang dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai tim ahli guna memberikan pandangan akademis terhadap persoalan tata ruang yang muncul di kawasan tersebut. Ketua DPRD Sidoario, Abdillah Nasih menyampaikan bahwa hasil rapat menegaskan posisi DPRD yang tetap netral dan berpihak pada kepentingan publik secara keseluruhan.

Pada prinsipnya kami di DPRD tidak memihak ke salah satu pihak. Dari hasil diskusi dengan tim ahli ITS, ternyata banyak hal mendasar dalam pengelolaan tata ruang di Sidoario yang perlu segera dibenahi. Kasus Mutiara City dan Mutiara Regency ini menjadi pelajaran berharga agar ke depan perencanaan tata ruang kita harus lebih rigid dan presisi." jelas Cak Nasih usai rapat. Kamis (30/10/2025).



la menambahkan, peristiwa di kawasan tersebut bukan hanya persoalan dua perumahan semata, melainkan menggambarkan lemahnya sinkronisasi tata ruang antar wilayah. Menurutnya, kasus serupa berpotensi terjadi di kawasan lain bila tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh.



Dari hasil rapat, DPRD Sidoarjo merumuskan empat poin rekomendasi utama:

- DPRD dan Pemkab Sidoarjo akan memfasilitasi mediasi antara warga yang menolak pembukaan jalan penghubung dengan pihak pengembang Mutiara City, agar ditemukan solusi bersama tanpa merugikan pihak manapun.
- Pemkab Sidoarjo diminta segera menyusun kajian tata ruang baru, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kota Sidoarjo yang hingga kini belum tersedia. Kajian tersebut penting untuk memastikan status dan fungsi kawasan, apakah termasuk wilayah permukiman, industri, atau komersial.
- Pemerintah juga diharapkan menetapkan rencana pengembangan kawasan secara jangka panjang, tidak hanya fokus pada pembukaan jalan, tetapi juga menyiapkan alternatif lain seperti pelebaran Jalan Jati atau jalur baru yang dapat mengakomodasi enam perumahan besar di wilayah tersebut.
- Jika muncul gugatan hukum dari warga atau pengembang, DPRD menghormati sepenuhnya proses tersebut sebagai bagian dari hak konstitusional warga.

Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo H. Abidillah Nasikh menegaskan bahwa hingga proses kajian tata ruang rampung, DPRD merekomendasikan agar pembongkaran pembatas jalan antara dua perumahan itu ditunda.

"Kita belum memiliki RDTR yang menjadi acuan hukum tata ruang di kawasan tersebut. Karena itu, kami minta agar pembatas jalan tidak dibongkar dulu sampai pemerintah memiliki dasar perencanaan yang jelas," tegasnya.

Rapat tertutup tersebut menjadi momentum awal bagi Pemkab Sidoarjo untuk menata ulang kebijakan tata ruang yang selama ini dinilai belum menyeluruh.

Masih kata ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan akademisi dari ITS, diharapkan penyusunan RDTR segera dilakukan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang pungkasnya.

pandangan terkait polemik tembok pembatas di perumahan Mutiara Regency.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat dengar pendapat internal yang melibatkan unsur pimpinan, Komisi A, dan Komisi C DPRD Sidoarjo itu berjalan lancar.

DPRD Sidoarjo Libatkan Ahli Unair Bahas Polemik Pagar Pembatas Mutiara Regency

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengundang dua akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk memberikan pandangan terkait polemik tembok pembatas di perumahan Mutiara Regency.

Rapat dengar pendapat internal yang melibatkan unsur pimpinan, Komisi A, dan Komisi C DPRD Sidoarjo itu berlangsung intens. Kedua tim ahli—yang terdiri dari pakar hukum dan tata ruang—mendapat berbagai pertanyaan dari para anggota DPRD kabupaten Sidoarjo.

Setelah lebih dari dua jam pembahasan, DPRD Sidoarjo akhirnya merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar tidak membuka akses jalan yang menghubungkan antara perumahan Mutiara City dan Mutiara Regency.

“Kesimpulan rapat DPRD Sidoarjo adalah tidak menyetujui pembukaan akses jalan penghubung antara perumahan Mutiara City dengan Mutiara Regency,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, usai rapat konsultasi bersama tim ahli. Menurut Abdillah, langkah berikutnya adalah melanjutkan proses mediasi antara pihak pengembang Mutiara City dan warga Mutiara Regency yang menolak pembongkaran pagar pembatas. DPRD dan Pemkab Sidoarjo diminta berperan aktif mencari solusi yang adil bagi kedua pihak.

Ia juga meminta Pemkab segera melakukan kajian terbaru Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sidoarjo. “Selama ini kawasan kota Sidoarjo belum memiliki RDTR. Jadi belum ada kejelasan mengenai peruntukan wilayahnya, apakah termasuk kawasan hunian, industri, atau jalan,” jelasnya.

Politikus yang akrab disapa Cak Nasih itu menilai Pemkab Sidoarjo perlu menyiapkan berbagai alternatif kebijakan dalam menata kawasan tersebut. Hal ini karena terdapat sekitar enam perumahan besar yang menambah beban lalu lintas di Jalan Raya Jati.

“Ke depan, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah konkret seperti pelebaran jalan atau membuat akses alternatif baru agar mobilitas warga tidak terhambat,” tegasnya.

Cak Nasih menambahkan, DPRD Sidoarjo menghormati jika nantinya warga Mutiara City maupun Mutiara Regency menempuh jalur hukum terhadap pihak pengembang, apabila ditemukan indikasi wanprestasi dalam perjanjian pembangunan. “Kalau memang ada pelanggaran kontrak, silakan diselesaikan secara hukum,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Kayan, menyoroti belum tertatunya RDTR Kecamatan Sidoarjo secara menyeluruh. Ia menyebut ada Tanah Kas Desa (TKD) Banjarbendo yang disewa pihak pengembang Mutiara City sebagai akses jalan, padahal status lahananya masih hijau atau diperuntukkan untuk pertanian.



“Akses jalan antara cluster selatan dan utara Mutiara City itu dibangun di atas lahan TKD yang statusnya masih hijau. Kalau diubah menjadi jalan, tentu perlu ada perubahan peruntukan terlebih dahulu,” ungkap Kayan.

Politikus Gerindra itu juga menyebutkan, berdasarkan dokumen Andalalin maupun site plan perumahan Mutiara City, tidak tercantum adanya akses jalan yang menghubungkan langsung dengan perumahan Mutiara Regency.

“Dalam dokumen Andalalin dan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) milik Mutiara City tidak tercantum adanya jalan penghubung ke Mutiara Regency,” ungkapnya. (ADV/rab)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoario, Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Sidoario Terhadap 2 (dua) Raperda Sidoario



Liputan5news.com - Sidoario, DPRD Kabupaten Sidoario menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan kesatu tahun sidang 2025 di ruang rapat paripurna dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoario, H. Abdillah Nasih, Sabtu (1/11/2025).



Turut hadir dalam rapat ini, Bupati Sidoario, Ketua DPRD Sidoario dan segenap Anggota Dewan, Anggota Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kabupaten Sidoario, Ketua Pengadilan Negeri Sidoario, Para Komandan/ Kepala Kesatuan TNI-POLRI di Kabupaten Sidoario, Para Pimpinan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Sidoario, Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoario, Para Pimpinan Partai, Ormas, LSM, Organisasi Wanita, Wartawan (Media Cetak dan Elektronik).



Rapat yang dihadiri oleh 28 anggota DPRD ini membahas dua agenda. Agenda I. Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Agenda II. Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.



Agenda I. Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah diwakili oleh fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Bambang Pujianto.

Dalam pandangannya, Bambang Pujianto menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda tersebut sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah.

"Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pajak dan restribusi daerah yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Lebih lanjut Bambang Pujianto menyampaikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah, perubahan ini harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Dalam perspektif Islam, konsep pajak dan restribusi memiliki keterkaitan dengan nilai - nilai syariah, khususnya pada tujuan perlindungan harta yang menekankan konsep keadilan dan kemaslahatan," jelasnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti beberapa Pasal penting dalam rancangan perubahan Perda diantaranya : Pasal 15 ayat (7) dan (8) yang mengatur tentang nilai objek tidak kena pajak untuk perolehan hak karena hibah atau waris. Sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 250 juta. Ketentuan ini dihapuskan dengan pertimbangan penyesuaian terhadap pasal 46 ayat (6) dan pasal 47 ayat (7) undang - undang Nomor 1 tahun 2022.

Pasal 40, dilakukan penyesuaian agar selaras dengan pasal 81 Undang - undang Nomor 1 tahun 2022, sehingga klausulnya kini mengatur secara spesifik mengenai pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Bambang Pujianto juga menyampaikan bahwa struktur restribusi daerah perlu diperbarui dengan prinsip efisiensi dan transparansi. Pengelolaan data restribusi, terutama pada fungsi data usaha dan restribusi perizinan tertentu yang tersebar di 11 OPD harus dilakukan secara terintegrasi agar terhindar dari praktik pungutan liar dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Fraksi Gerindra mendorong agar pemanfaatan aset daerah dilakukan secara akuntabel, tidak menambah beban masyarakat dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan. Pemanfaatan aset untuk kegiatan ekonomi harus berorientasi pada berkelanjutan," ungkapnya.

Bambang Pujiyanto menegaskan kami berharap pandangan umum ini menjadi masukan yang konstruktif demi kebaikan seluruh masyarakat Sidoarjo. Semoga setiap keputusan yang diambil membawa manfaat berkelanjutan, kesejahteraan merata dan semangat kebersamaan untuk membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan adil.

Sementara itu, agenda II. Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2026. Pada penyampaian pandangan ini diwakili oleh fraksi NasDem - Demokrat, yang disampaikan oleh Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom

Dalam pandangannya, Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom. menyampaikan bahwa

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument penting kebijakan ekonomi dan social yang dimiliki oleh pemerintah Daerah , untuk mewujudkan cita – cita bernegara dan memenuhi harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan umum, pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan daya saing daerah . Melalui alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)masyarakat akan mengetahui apa yang menjadi prioritas pemerintahannya, dan sebaliknya dari proses penganggaran APBD, Pemerintah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak masyarakatnya. Dengan demikian maka pengelolaan anggaran daerah sebenarnya merupakan bentuk hubungan antara warga negara sebagai membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya dengan Pemerintah sebagai penyedia layanan publik.

"Dalam menyikapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026, marilah kita bersama-sama meneruskan pembangunan yang telah berjalan dengan baik menjadi lebih baik," jelasnya.

Lanjut Dimas Fraksi Demokrat - NasDem menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal utama daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinkronisasi program daerah dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

"Namun demikian, setelah mencermati secara seksama dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi Demokrat – NasDem memberikan beberapa catatan, penilaian, dan rekomendasi strategis diantaranya, Pertama : DPRD berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih Optimis dan prudent (berhati - hati) dalam merancang dan melaksanakan struktur keuangan daerah : optimalisasi pendapatan khususnya dari PAD, belanja yang lebih tepat sasaran, efesien dan efektif sesuai dengan prioritas daerah, serta menekan Silpa. Track record kita untuk urusan Silpa ini yang seringkali disorot, karena kita punya sumber daya keuangan tetapi sulit untuk melaksanakannya. Kedua : Adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat



mestinya menjadi momentum pengingat agar kita lebih efektif mendorong kemandirian fiskal. Potensi PAD kita dengan status sebagai daerah penyangga kota Surabaya semestinya bisa lebih dioptimalkan lagi, tinggal perlu adanya updating database perpajakan, meningkatkan kemudahan sistem pembayaran, serta membangun modal sosial dengan wajib pajak. Kalau pengelolaan keuangan daerah masih amburadul, bagaimana kita bisa berharap para wajib pajak mau taat secara sukarela bergotong royong untuk melaksanakan kewajibannya. Ketiga : Kebijakan APBD seharusnya mampu menggugah optimisme masyarakat. Oleh karena itu, desain kebijakan seharusnya mampu menjadi "obat" kebutuhan masyarakat. Nanti dampaknya akan kembali ke kesadaran masyarakat, bahwa untuk mampu menyediakan "obat' tersebut, juga butuh kontribusi dari masyarakat," papar Dimas.]

Di akhir penyampaiannya Muh. Zakaria Dimas Pratama menegaskan mari jadikan pembahasan APBD ini bukan sekedar rutinitas administratif, tetapi langkah nyata untuk membangun Sidoarjo yang lebih maju, adil dan sejahtera. (Yanti)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Sidoario Bakal Tata Ulang Sentra Kuliner Gajahmada Sidoario



Progres Jatim.com, Sidoario – Beberapa penjual di sentra kuliner Gajahmada Sidoario mengeluh sepi pembeli. Keluhan itu diterima Wakil Bupati Sidoario Hi. Mimik Idayana dari Media Sosialnya. Pengirimnya seorang penjual nasi yang menempati stan ujung belakang sentra kuliner.

Sore kemarin, Wabup Hi. Mimik Idayana menanggapinya dengan datang langsung ke sentra kuliner Gajahmada Sidoario milik Pemkab Sidoario itu. Senin (3/11). Dijelajahinya satu persatu stan jualan yang disewakan gratis tersebut. Beberapa penjual pun ditanyainya. Mulai fasilitas air, listrik sampai permodalan usaha.

Wabup Hi. Mimik Idayana berjanji akan menata ulang sentra kuliner Gajahmada agar ramai pembeli. Menurutnya dibutuhkan promosi yang gencar untuk menghidupkan kembali sentra kuliner Gajahmada. Salah satunya dengan menggelar berbagai event di tempat tersebut.

“Nanti kita tata kembali agar ramai pembeli, dan juga harus ada event disini agar sentra kuliner Gajahmada semakin dikenal masyarakat luas,” ucapnya.

Wabup Hi. Mimik Idayana mengatakan saat ini promosi lewat Medsos menjadi cara ampuh untuk mengenalkan suatu tempat. Namun juga harus ada sisi yang menarik dari tempat itu untuk ditonjolkan. Semisal makanan terfavorit di sentra kuliner Gajahmada yang harus banyak ditampilkan. Dengan cara itu ia yakin mampu menarik minat pengunjung.

“Kuliner disini yang paling menonjol harus kita tampilkan karena sekarang itu sudah jamannya media sosial, kalau kita hanya menunggu pembeli tidak akan bisa, kita mainkan medsos kita,” ucapnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Sidoario, Amat Adi Subhan mengatakan ada 80 stan yang ada di sentra kuliner Gajahmada Sidoario. Namun yang masih ditempati untuk berjualan berjumlah 42 stan. Padahal awalnya seluruh stan terisi seluruhnya.

“Tahun 2019 seluruh PKL yang berjualan disepanjang jalan protokol Gajahmada kita pindah ke sentra kuliner Gajahmada ini, kita fasilitasi gratis seluruhnya mulai listrik dan airnya, tidak ada pungutan apapun,” ucapnya.



Ia pun menyayangkan kondisi sentra kuliner Gajahmada Sidoario saat ini. Padahal sebelum Covid19 kondisinya cukup ramai. Pemkab Sidoario juga selalu melakukan pemeliharaan sentral kuliner satu-satunya milik Pemkab Sidoario tersebut. Pemkab Sidoario akan terus berupaya meramaikan kembali sentra kuliner tersebut dengan berbagai even kegiatan.

"Rencana kedepan setelah ada appraisal, kita akan adakan lelang tempat yang masih kosong kepada para UMKM yang ada di Sidoario agar ramai," ujarnya.

Sementara itu Ari pemilik warung Invo yang menempati salah satu stan meminta Pemkab Sidoario kembali memajukan sentra kuliner Gajahmada. Dikatakannya banyak stan kosong yang berada dibelakang. Warung tersebut ditinggalkan pemiliknya karena sepi pembeli. Ia berharap Pemkab Sidoario berupaya kembali meramaikan sentra kuliner itu.

"Alhamdulilah Bu Mimik datang kesini dan mengajak kita untuk memajukan sentra kuliner ini, beliaunya tadi meminta kasi event di tempat ini, dan kemarin saya sudah menggelar event taritarian dan alhamdulillah ada peningkatan pengunjung," ucapnya. (GUS)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo gelar Pilkades Serentak 2026 di 80 desa



SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026. Sebanyak 80 desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Penetapan tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Dalam kesepakatan Pilkades serentak nanti, tahapan pelaksanaan Pilkades dimulai dengan masa persiapan pada 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Tahapan pencalonan berlangsung pada 14 Januari hingga 23 April 2026, disusul pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026. Sementara itu, tahap penetapan hasil Pilkades dijadwalkan pada 24 Mei hingga 29 Juni 2026. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkades agar berjalan aman dan lancar.

“Kami ingin Pilkades 2026 ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel,” kata bupati saat memberikan arahan pada rapat Pilkades Tahun 2026 di Opsroom Setda Kab. Sidoarjo, Senin (3/11/2026). Bupati juga menambahkan bahwa sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan. “Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa,” lanjutnya. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing memastikan seluruh tahapan Pilkades 2026 akan berlangsung kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat. “Kami siap melakukan pengamanan pada saat Pilkades serentak tahun 2026 mendatang,” ungkapnya.

Selain itu, dalam hal terdapat desa dengan hanya satu calon kepala desa, pelaksanaan Pilkades serentak di desa tersebut akan ditunda hingga terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

